

**KEBIJAKAN POKOK DAN STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA
DI MADRASAH IBTIDAIYAH**

Zuhriyyah Hidayati^{1*}

¹Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Fattah

*e-mail: zuhriyyahhidayati@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang kebijakan pokok dan strategi implementasi Kurikulum Merdeka yang bisa diterapkan di madrasah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pokok dan strategi implementasi Kurikulum Merdeka yang bisa diterapkan di madrasah, guna mewujudkan pendidikan yang bermutu sesuai tantangan perkembangan zaman. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka yaitu meninjau berbagai referensi sebagai penunjang dan penguat data. Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat kebijakan pokok dalam implementasi Kurikulum Merdeka, yakni madrasah menerapkan Kurikulum 2013 dengan melakukan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum operasional di masing-masing madrasah dan madrasah menerapkan Kurikulum Merdeka dengan melakukan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum operasional di masing-masing madrasah. Adapun strategi dalam implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah ibtidaiyah yang bisa diterapkan adalah melakukan pelatihan mandiri di lembaga baik melalui Platform Merdeka Mengajar maupun dengan mendatangkan narasumber Kurikulum Merdeka, menyusun kurikulum operasional madrasah, menyusun perencanaan pembelajaran dan asesmen serta perangkat ajar, menyiapkan strategi pendamping implementasi Kurikulum Merdeka seperti pembelajaran berdiferensiasi, penguatan kemitraan dengan orang tua, dan penguatan moderasi beragama. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pokok dan strategi implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah merupakan bukti bahwa kurikulum bersifat dinamis. Artinya, kurikulum selalu berubah bergantung pada kebutuhan peserta didik dan tuntutan perkembangan zaman.

Kata kunci : *Implementasi Kurikulum Merdeka, Kurikulum Merdeka, Madrasah Ibtidaiyah, Strategi.*

Abstract: This study discusses the main policies and strategies for implementing the *Kurikulum Merdeka* that can be applied in madrasah. This study aims to describe the main policies and strategies for implementing the *Kurikulum Merdeka* that can be applied in madrasah, in order to create quality education according to the challenges of the times. The research method used is literature review, namely reviewing various references to support and reinforce data. The results of the study stated that there was a main policy in the implementation of the *Kurikulum Merdeka*, namely madrasah implementing the *Kurikulum 2013* by creating and innovating in developing operational curricula in each madrasah and madrasah implementing the *Kurikulum Merdeka* by carrying out creations and innovations in developing operational curricula in each madrasah. The strategy for implementing the *Kurikulum Merdeka* in madrasah primary schools that can be implemented is conducting independent training in institutions either through the *Platform Merdeka Mengajar* or by bringing in *Kurikulum Merdeka* speakers, compiling an operational madrasah curriculum, preparing lesson plans and assessments as well as teaching tools,

preparing accompanying strategies for implementing the *Kurikulum Merdeka* such as differentiation learning, strengthening partnerships with parents, and strengthening religious moderation. It can be concluded that the main policies and strategies for implementing the *Kurikulum Merdeka* in madrasah are evidence that the curriculum is dynamic. That is, the curriculum is always changing depending on the needs of students and the demands of the times.

Keywords: Implementation of *Kurikulum Merdeka*, *Kurikulum Merdeka*, Madrasah Ibtidaiyah, Strategy.

PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu dua-tiga tahun terakhir, pendidikan di Indonesia mengalami beberapa transformasi, khususnya dalam bidang kurikulum. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mencetuskan program Merdeka Belajar sebagai program utama dalam seratus hari pertamanya. Paradigma Merdeka Belajar dimaksudkan sebagai sebuah gagasan yang membebaskan para guru dan siswa dalam menentukan sistem pembelajaran. Merdeka Belajar juga dimaksudkan untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan guru karena selama ini pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada aspek pengetahuan daripada aspek keterampilan. Selain itu Merdeka Belajar juga dirancang dengan menekankan pada aspek pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia (Ainia, 2020). Dalam praktiknya, Merdeka Belajar dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pihak, baik pemerintah, guru, pelaku industri, orang tua, keluarga, masyarakat untuk mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas (Komunitas Pemuda Pelajar Merdeka, 2021, iii).

Dengan adanya kebijakan ini, banyak perubahan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Salah satu di antaranya empat kebijakan utama dalam Merdeka Belajar, yakni: ujian sekolah berstandar nasional (USBN) menjadi asesmen sekolah, ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter (AKM-SK), rencana pelaksanaan pengajaran (RPP) yang efektif, efisien, berorientasi belajar siswa, dan kebijakan PPDB zonasi (Kemdikbud, 2019). Program-program ini semakin mendapat momentum ketika Covid-19 melanda di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Beragam transformasi pendidikan dirancang tidak hanya untuk mengatasi berbagai problematika pendidikan di Indonesia, tetapi juga untuk menghadapi persoalan yang diakibatkan oleh Covid-19, salah satunya adalah persoalan *learning loss* (ketertinggalan pembelajaran pada ketercapaian kompetensi peserta didik) (Cerelia, dkk, 2021) (Nugraha, 2022).

Untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*) Pemerintah melalui Kemdikbudristek bersama kementerian lain mengupayakan berbagai layanan pemulihan pembelajaran dampak Pandemi Covid-19. Salah satu di antaranya adalah memberikan tiga opsi implementasi kurikulum pada satuan pendidikan, yakni pelaksanaan kurikulum 2013 secara

penuh, menggunakan kurikulum darurat (yaitu Kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh Kemendikbudristek), dan penyederhanaan kurikulum secara mandiri (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020). Selanjutnya, dari tiga opsi ini, digagaslah tiga opsi sebagai langkah praktis, yakni: pelaksanaan Kurikulum 2013 secara penuh, kurikulum darurat, dan Kurikulum Merdeka (Paparan Kemdikbudristek, 2021b).

Kurikulum Merdeka sendiri dirumuskan bukan hanya sekedar respon atau jawaban akan fenomena *learning loss*, tapi dari sisi filosofis landasan Kurikulum Merdeka adalah bentuk jawaban dari krisis belajar yang sudah lama dihadapi Bangsa Indonesia serta menjadi jawaban dari perubahan yang tidak bisa dihindari. Krisis ini ditandai oleh rendahnya hasil belajar peserta didik, bahkan dalam hal yang mendasar seperti literasi membaca.

Pada tahun ajaran 2021/2022 Kurikulum Merdeka telah diimplementasikan oleh hampir 2500 sekolah yang mengikuti Program Sekolah Penggerak (PSP) dan 901 SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) sebagai bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum ini diterapkan mulai dari TK-B, SD & SDLB kelas I dan IV, SMP & SMPLB kelas VII, SMA & SMALB dan SMK kelas X. Selanjutnya pada tahun ajaran 2022/2023 dalam laporan resmi, Kurikulum Merdeka diimplementasikan oleh 6746 yang terdaftar pada Sekolah Penggerak angkatan 2 dan juga oleh satuan pendidikan yang sudah siap dimulai TK-B kelas I, IV, VII, dan X. Dalam hal ini, Pemerintah menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahap kesiapan dirinya untuk menggunakan Kurikulum Merdeka. Sementara untuk tahun ajaran 2023/2024 Sekolah Penggerak sejumlah 4999 (<https://psp-web.pauddikdasmen.kemdikbud.go.id/#/home>) sudah siap mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dan diberikan tiga pilihan implementasi Kurikulum Merdeka untuk satuan pendidikan non penggerak yang memilih menggunakan Kurikulum Merdeka. Tiga pilihan tersebut adalah: (1) Mandiri Belajar, satuan pendidikan menerapkan beberapa prinsip Kurikulum Merdeka dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen namun tetap menggunakan kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan, (2) Mandiri Berubah, satuan pendidikan menggunakan Kurikulum Merdeka dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkannya dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen, dan (3) Mandiri Berbagi, yakni satuan pendidikan menggunakan Kurikulum Merdeka dalam mengembangkan satuan pendidikannya dan menerapkannya dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lain. (<https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/>).

Jika sekolah-sekolah sudah siap dengan implementasi Kurikulum Merdeka, madrasah, khususnya madrasah ibtidaiyah masih pada tahap awal dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Pada tahun ajaran 2022/2023 Kemenag melalui SK Direktur Jenderal

Pendidikan Islam tersebut menetapkan 2481 madrasah pelaksana kurikulum dengan rincian: Raudhatul Athfal (RA) : 233, MI (Madrasah Ibtidaiyah : 1010, MTs (Madrasah Tsanawiyah) : 740, dan MA (Madrasah Aliyah) : 498. Dalam SK tersebut juga disebutkan bahwa Dirjen Pendidikan Islam akan melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi secara berkala atas implementasi kurikulum merdeka pada madrasah (SK Dirjen Pendis Nomor 3811 Tahun 2022)

Pada awal tahun 2023 Kementerian Agama melalui Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Ditjen Pendidikan Islam menyelenggarakan bimbingan teknis implementasi Kurikulum Merdeka secara daring untuk semua jenjang dari jenjang RA hingga madrasah aliyah selama 13 hari pada 27 Januari-8 Februari 2023. Tercatat sejumlah 641.635 guru madrasah mengikuti bimtek secara serentak ini. Materi yang dibahas meliputi pengantar IKM, kebijakan IKM pada madrasah, penyusunan Kurikulum Operasional Madrasah, pembelajaran, asesmen, praktik baik P5 PPRA, dan pendaftaran IKM melalui PDUM (<https://kemenag.go.id/nasional/>).

Namun beberapa persoalan muncul dalam implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah. Di antaranya kurangnya informasi bagi guru tentang penyiapan perangkat pembelajaran, tidak tersedianya buku ajar, dan belum adanya format rapor hasil belajar siswa (Erdiansyah, Joharni, & Era kartikasari Ariani, 2022). Beberapa madrasah juga menyatakan belum siap untuk menerapkan Kurikulum Merdeka (Nurhayati, dkk., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Tsania & Surawan, (2022) juga menunjukkan bahwa Madrasah Ibtidaiyah Manbail Futuh Jenu belum siap menerapkan kurikulum merdeka pada tahun pelajaran 2022/2023 karena masalah sosialisasi dan pelatihan. Sebagian besar guru madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan pun menyatakan bahwa pemahaman tentang Kurikulum Merdeka masih minim karena hanya sedikit sekali guru yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Kurikulum Merdeka secara intensif (observasi bebas pada guru-guru MI di Kecamatan Turi).

Berdasarkan permasalahan tersebut, kesiapan madrasah merupakan masalah utama implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah. Hal ini dikarenakan sosialisasi di madrasah tidak sebaik di sekolah umum (Masnun, 2023). Beberapa penelitian tentang implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah yang sudah dilakukan adalah tentang kesiapan madrasah (Masnun, 2023), (Aprianti dkk., 2023), (Tsania & Surawan, 2022), (Nurhayati, dkk., 2022), tentang studi kebijakan KMA RI No. 347 Tahun 2022 yang dilakukan oleh Anas dkk. (2023), inovasi madrasah dalam menyambut Kurikulum Merdeka (2023). Adapun penelitian tentang strategi implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah yang sudah dilakukan oleh Wahyudi, dkk., (2022) fokus pada praktik pengabdian masyarakat yang dilakukan di MTs-MA Sunan Ampel Kebet. Sementara Swandari, N., & Jemani, A. (2023) memberikan titik perhatian pada problematikan penerapan Kurikulum Merdeka di madrasah. Dalam penelitian ini, peneliti

memberikan fokus pada strategi yang bisa digunakan oleh madrasah dalam implementasi Kurikulum Merdeka dengan berdasar pada kebijakan pokok yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Strategi dalam penelitian ini diadopsi dari pendampingan pada Sekolah Penggerak dalam implementasi Kurikulum Merdeka dengan beberapa penyesuaian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka yaitu menganalisis berbagai informasi konseptual dari buku, artikel, jurnal artikel ilmiah untuk mencari teori dan data-data yang mendukung. Penelitian kepustakaan bisa diartikan penelitian yang hanya didasarkan hasil karya tulis baik yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan. Menurut M. Nazir, penelitian kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian terhadap buku, literatur, memo, dan laporan yang berkaitan dengan masalah (Nazir, 1988: 111). Sedangkan menurut Zed, penelitian kepustakaan menggunakan data berupa literasi (buku, undang-undang dan jurnal) yang diolah dan dianalisis sebagai bahan dalam penelitian (Zed, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pokok Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah

Menindaklanjuti Keputusan Mendikbud Ristek Nomor 56/M/2022 yang kemudian dirubah dengan Keputusan Mendikbud Ristek Nomor 262/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, Menteri Agama mengeluarkan pada KMA 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah. KMA ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa implementasi kurikulum merdeka pada madrasah dilakukan dengan adaptasi dan penyesuaian akan pengembangan kekhasan nilai- nilai madrasah; dan kebutuhan pembelajaran di madrasah.

Adapun mekanisme implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah adalah sebagai berikut:

1. Madrasah secara mandiri melakukan persiapan implementasi Kurikulum Merdeka.
2. Madrasah menyusun dan mengembangkan kurikulum operasional madrasah sesuai visi, misi, tujuan, dan kekhasan madrasah.
3. Madrasah mengajukan usulan secara online melalui aplikasi PDUM, disertai surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.
4. Kanwil Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi dan persetujuan, selanjutnya diusulkan ke Kemenag pusat

5. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan madrasah pelaksana IKM (Direktorat KSKK Madrasah, 2022).

Sedangkan pelaksanaan Kurikulum Merdeka di madrasah ditentukan sebagai berikut:

1. Standar Isi (SI) dan Capaian Pembelajaran (CP) mata pelajaran selain Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek
2. Standar Isi (SI) dan Capaian Pembelajaran (CP) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama (KMA 347 Tahun 2022).

Dalam paktiknya, kebijakan pemberlakuan Kurikulum Merdeka di madrasah adalah

1. Kurikulum merdeka diterapkan pada RA, MI, MTs, MA dan MAK secara terbatas pada madrasah percontohan/piloting mulai TP 2022/2023 berdasarkan Ketetapan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
2. Pada tahun pertama diterapkan pada peserta didik RA usia 4 sampai 5 tahun, kelas 1 dan 4 MI, kelas 7 MTs dan kelas 10 MA/MAK. Sedangkan peserta didik kelas 2, 3, 5, 6, 8, 9,11 dan 12 masih menggunakan kurikulum 2013.
3. Pada tahun kedua diterapkan pada peserta didik RA usia 5 sampai 6 tahun, kelas 1, 2, 4, dan 5 MI, kelas 7 dan 8 MTs, dan kelas 10 dan 11 MA/MAK. Sedangkan peserta didik kelas 3, 6, 9, dan 12 masih menggunakan kurikulum 2013.
4. Pada tahun ketiga diterapkan pada peserta didik RA usia 4 sampai 6 tahun, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 MI, kelas 7, 8, 9 MTs dan kelas 10, 11, 12 MA/MAK.

Sebagai catatan, bagi madrasah yang baru mengimplementasikan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023/2024, maka tahapan implementasi dimulai dari awal sebagaimana implementasi pada tahun pertama (Direktorat KSKK Madrasah, 2022).

Dengan beberapa pokok kebijakan tersebut, madrasah-madrasah *piloting* diharapkan mampu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan dua pilihan, yakni: menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan, misalnya menerapkan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagai ko-kurikuler atau ekstrakurikuler dengan konsekuensi menambah atau merelokasi jam pelajaran, menerapkan pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik; atau menerapkan Kurikulum Merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan. Sebagai langkah praktisnya, madrasah secara mandiri melakukan persiapan, perencanaan, pelaksanaannya dengan belajar mandiri melalui dokumemn-dokumen yang disediakan oleh Kemenag dalam <https://sikurma.kemenag.go.id> serta platform-platform yang sudah disediakan seperti <https://pintar.kemenag.go.id/> dan Platform Merdeka Mengajar.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa madrasah-madrasah *piloting* ternyata mengalami banyak kendala dan problematika dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Madrasah Ibtidaiyan Negeri 2 Bantul misalnya. Implementasi Kurikulum Merdeka di sana belum sepenuhnya maksimal karena beberapa kendala. Di antaranya tidak adanya pelatihan bagi guru dan madrasah tentang bagaimana cara mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara detil. Para guru MIN 2 Bantul juga kesusahan untuk berdiskusi atau belajar bersama karena terbatasnya jumlah madrasah *piloting* (Zakiyah, N., & Achadi, M., 2023). Sementara di Banyuwangi problem yang muncul adalah kurangnya informasi bagi guru tentang penyiapan perangkat pembelajaran, tidak tersedianya buku ajar, dan belum adanya format rapor hasil belajar siswa. Selain itu, ditemukan kesenjangan penelitian tertentu, seperti perbedaan yang tidak jelas antara kurikulum mandiri dan kurikulum 2013, dan kurangnya pilihan kurikulum mandiri di Database Simpatik Kementerian Agama (Erdiansyah, Joharni, & Era kartikasari Ariani, 2022).

Untuk menghadapi problematika penerapan Kurikulum Merdeka, ada beberapa strategi yang bisa digunakan madrasah. Strategi yang ditawarkan ini sebenarnya tidak jauh berbeda antara praktik yang sudah dilakukan oleh Sekolah Penggerak dan apa yang ditulis dalam Pedoman IKM pada Madrasah. Hanya saja, ada strategi yang memang khas milik madrasah, seperti dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang dilengkapi dengan Profil Pelajar *Rahmatan lil Alamin* pada madrasah. Juga tema moderasi beragama bisa dijadikan kekhasan madrasah.

Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah

Beberapa strategi yang bisa dijadikan langkah-langkah strategis dalam penerapan Kurikulum Merdeka di madrasah di antaranya:

1. Strategi Pertama: Melaksanakan Pelatihan Perencanaan Kurikulum Merdeka secara Aktif

Melakukan persiapan dari segi materi dan komponen Kurikulum Merdeka dengan pelaksanaan bimtek, pelatihan, dan juga workshop secara aktif. Ini bisa dilakukan dengan belajar mandiri pada platform-platform yang sudah disediakan baik itu <https://sikurma.kemenag.go.id>, <https://pintar.kemenag.go.id/>, maupun Platform Merdeka Mengajar (PMM). Bisa juga dilakukan dengan mendatangkan narasumber yang kompeten dalam Kurikulum Merdeka serta mampu mendampingi madrasah untuk mempelajari dan menyusun dokumen-dokumen pokok dalam Kurikulum Merdeka, seperti dokumen Kurikulum Operasional Madrasah (KOM), dokumen pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, dan juga dokumen modul ajar baik modul ajar intrakurikuler maupun modul proyek. Jika selama ini bimtek banyak dilakukan secara pasif, maka strategi bimtek harus dirubah menjadi workshop. Narasumber harus beralih fungsi menjadi fasilitator yang bisa

mendampingi semua proses penyiapan implementasi Kurikulum Merdeka ini. Tentu saja pendampingan ini tidak singkat dan bisa selesai dalam satu atau dua hari. Namun, dengan pendampingan intensif ini hasil yang didapat juga akan maksimal.

Strategi ini yang dipraktikkan dalam program Sekolah Penggerak Kemendikbud, dimana setiap Sekolah Penggerak didampingi oleh satu fasilitator secara intensif dalam jangka waktu tertentu. Strategi ini juga bisa diadopsi oleh madrasah secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada seperti pengawas madrasah, guru atau kepala sekolah yang sudah terlebih dahulu menerapkan Kurikulum Merdeka, juga lembaga mitra lain yang kompeten seperti unsur dosen yang juga mempunyai kepentingan dalam program pengabdian kepada masyarakat.

2. Strategi Kedua: Melaksanakan Pelatihan Materi Pokok Kurikulum Merdeka

Materi pokok yang dimaksud adalah tentang isi atau aspek-aspek pokok dari Kurikulum Merdeka yang meliputi: pembelajaran paradigma baru, pembelajaran dan asesmen/penilaian, capaian pembelajaran (CP), tujuan pembelajaran (TP) dan alur tujuan pembelajaran (ATP), proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin (P5 PPRA), dan pembelajaran berdiferensiasi. Aspek-aspek tersebut merupakan komponen inti dari kurikulum yang meliputi tujuan, isi, metode, dan evaluasi. (Tyler, 1969). Capaian pembelajaran yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran dan juga alur tujuan pembelajaran merupakan aspek tujuan sekaligus isi pembelajaran. Sementara pembelajaran berdiferensiasi merupakan strategi atau metode pembelajaran. Sedangkan topik asesmen merupakan penilaian atau evaluasi dalam pembelajaran. Dengan demikian, aspek-aspek pokok ini harus benar-benar dipahami baik oleh guru maupun sivitas akademik secara keseluruhan.

3. Strategi Ketiga: Membentuk Tim Pengembang Kurikulum

Tim pengembang kurikulum ini bisa juga disebut sebagai komite pembelajaran. Jika dalam suatu madrasah terdapat guru dalam jumlah besar, komite pembelajaran ini yang menjadi pionir yang bertanggungjawab dalam pengembangan kurikulum. Komite pembelajaran ini juga yang nantinya bertanggung jawab atas terlaksananya implementasi Kurikulum Merdeka yang bisa dilakukan melalui *in house training* dalam satuan pendidikannya masing-masing.

4. Strategi Ketiga: Implementasi Kurikulum Merdeka secara Bertahap

Sesuai dengan karakteristiknya, penerapan Kurikulum Merdeka harus dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik dan madrasah. Karenanya, dokumen-dokumen dalam Kurikulum Merdeka adalah dokumen hidup yang bisa direview, direvisi, serta diperbaiki dalam jangka waktu yang diperlukan. Kurikulum Operasional Madrasah misalnya, bisa diperbaiki jika dalam jangka waktu satu semester

terdapat beberapa kekurangan dan penyesuaian. (Dengan catatan komponen KOM yang bisa diperbaiki dalam jangka pendek adalah komponen pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran. Penyusunan modul ajar pun tidak harus disusun sekaligus di awal tahun ajaran karena bisa dikembangkan dari kondisi serta situasi yang dihadapi madrasah.

5. Strategi Keempat: Refleksi Satuan Pendidikan secara Berkala

Salah satu ciri dari implementasi Kurikulum Merdeka adalah pelaksanaan refleksi satuan pendidikan. Refleksi satuan pendidikan bertujuan agar guru-guru di madrasah mampu melakukan refleksi berkala dan berkelanjutan serta merumuskan langkah rencana tindak lanjut yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan madrasah. Tema refleksi bisa ditentukan sesuai dengan kebutuhan atau program yang sedang dilaksanakan. Bisa juga menggunakan tema-tema terbaru dalam pendidikan dengan catatan tema tersebut relevan dengan penerapan Kurikulum Merdeka.

6. Strategi Kelima: Memfasilitasi Pembentukan Komunitas Belajar di Tingkat Satuan Pendidikan

Komunitas belajar atau disebut juga sebagai komunitas praktisi mempunyai lima tujuan, yakni mengedukasi anggota dengan mengumpulkan dan berbagi informasi yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan tentang praktik pengajaran dan pembelajaran, memberi dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi sesama anggota, mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran mereka, mendorong anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi, dan mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan dengan pekerjaan sehari-hari (Kemdikbud, 2020). Jadi komunitas praktisi ini terdiri dari dari guru-guru madrasah di satuan pendidikan yang nantinya saling bergantian untuk saling belajar dan berbagi dengan tema yang sesuai dengan kebutuhan guru.

7. Strategi Keenam: Penyiapan Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Rahmatan Lil Alamin yang Berbasis pada Nilai-nilai Moderasi Beragama

Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Rahmatan Lil Alamin (P5-RA) memang masuk dalam perencanaan di kurikulum operasional madrasah (KOM). Namun dalam pelaksanaannya dibutuhkan satu tim khusus serta modul tersendiri dalam pelaksanaannya. Ini bisa dimulai dengan pembentukan tim, penentuan tema serta dimensi Profil Pelajar Pancasila ditambah dengan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin. Di bagian inilah pendidikan karakter bisa dilaksanakan secara maksimal.

SIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pokok implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah masih dalam proses. Artinya, belum semua madrasah diharuskan menerapkan Kurikulum Merdeka karena proses sosialisasi dan juga bimbingan teknis dari Kemenag melalui KSKK juga masih terus berlangsung. Kebijakan Kemenag tentang pembelajaran implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri sebenarnya perlu diperkuat dengan kebijakan teknis di lapangan melalui Kanwil Kemenag Provinsi dan juga pengawas madrasah atau dengan melibatkan lembaga mitra lain yang kompeten dalam Kurikulum Merdeka. Adapun strategi yang bisa dilakukan madrasah dalam persiapan penerapan Kurikulum Merdeka antara lain dengan melakukan pelatihan mandiri yang mencakup pelatihan

Kebijakan pokok dan strategi implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah ini digagas Kemenag RI melalui Direktorat KSKK. Berdasarkan hal tersebut, diketahui pula bahwa dalam prakteknya, kebijakan pokok Kurikulum Merdeka mengacu pada standar pendidikan Nasional yang sudah dirumuskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga standar internasional PISA dan TIMSS. Standar ini menjadi patokan bagi lembaga pendidikan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kurikulum Merdeka di madrasah sebaiknya dilaksanakan secara bertahap dan tidak terburu-buru agar dapat mengukur kesiapan madrasah untuk menerapkan Kurikulum Merdeka. Dalam hal ini, kesiapan madrasah harus benar-benar dikaji serta diperhitungkan dalam rencana program kerja baik Kemenag RI hingga pada level pengawas madrasah dalam rangka menyukseskan implementasi Kurikulum Merdeka secara menyeluruh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pokok dan strategi implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia pada umumnya dan madrasah pada khususnya, merupakan bukti bahwa kurikulum bersifat dinamis. Artinya, kurikulum selalu berubah bergantung pada kebutuhan peserta didik dan tuntutan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainia, Dela Khoirul. 2020. Merdeka Belajar dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara dan Relevansinya bagi Pengembanagan Pendidikan Karakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol 3 No 3. <https://doi.org/10.23887/jfi.v3i3.24525>.
- Aisyah, S., Arisanti, K., & Yaqin, F. A. (2023). Adaptasi dan Inovasi Madrasah Ibtidaiyah dalam Menyambut Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(1), 386–393. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i1.4583>.
- Anas Anas, Akhmad Zaenul Ibad, Nova Khairul Anam, & Fitri Hariwahyuni. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Madrasah Ibtidaiyah (MI) (Studi Analisis Kebijakan

- KMA RI No. 347 Tahun 2022). *Journal of Creative Student Research*, 1 (1), 99–116.
<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jcsr/article/view/1043>
- Apriatni, S., Novaliyosi, N., Nindiasari, H. ., & Sukirwan, S. (2023). Analisis Kesiapan Madrasah dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka (Studi di MAN 2 Kota Serang). *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6 (1), 435-446.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1399>.
- Cerelia, dkk. (2021). *Learning Loss* Akibat Pembelajaran Jarak Jauh Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia. Pada *Prosiding Nasional Departemen Statistika FMIPA Unpad*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Direktorat KSKK Madrasah Dirjen Pendis Kemenag RI. 2022. *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah*.
- Erdiansyah, Joharni, & Era kartikasari Ariani. (2022). Problematika Madrasah Pilot Project Kurikulum Merdeka Tahun Pelajaran 2022 – 2023 di Madrasah Aliyah se- Kabupaten Musi Banyuasin. *HEUTAGOGIA: Journal of Islamic Education*, 2(2), 121–134.
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/HJIE/article/view/6277>.
<https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/6824815789465-Kebijakan-Pemerintah-Terkait-Kurikulum-Merdeka>
<https://psp-web.pauddikdasmen.kemdikbud.go.id/#/home>
- Kemdikbud, 2019. Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”. Siaran Pers No. 408.sipres/A5/3/XII/2019.
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/mendikbud-tetapkan-empat-pokok-kebijakan-pendidikan-merdeka-belajar>
- Kemdikbud, 2020. *Belajar di Komunitas Praktisi*.
- Keputusan Mendikbud Ristek Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.
- Keputusan Mendikbud Ristek Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus.
- Masnun, M. (2023). Kesiapan Madrasah Ibtidaiyah dalam Menghadapi Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4 (1), 235-246.
<https://doi.org/10.36312/jcm.v4i1.1327>

- Nazir, M. 2003. *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nugraha, Tono Supriatna. (2022). Kurikulum Merdeka untuk Pemulihan Krisis Pembelajaran. *Inovasi Kurikulum* 19 (2), 251-262. <https://doi.org/10.17509/jik.v19i2.45301>.
- Nurhayati, P., Emilzoli, M., & Fu'adiah, D. (2022). Peningkatan Keterampilan Penyusunan Modul Ajar Dan Modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Kurikulum Merdeka Pada Guru Madrasah Ibtidaiyah. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6 (5), <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i5.10047>.
- Paparan Kemdikbudristek. (2021a). Merdeka Belajar Episode Ketujuh; Program Sekolah Penggerak.
- Paparan Kemdikbudristek. (2021b). Merdeka Belajar Episode Kelima Belas; Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar.
- SK Dirjen Pendis Nomor 3811 Tahun 2022 tentang Madrasah Pelaksana Kurikulum Merdeka Tahun Pelajaran 2022/2023.
- Swandari, N., & Jemani, A. (2023). Mitra Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah dan Problematikanya. *PROGRESSA: Journal of Islamic Religious Instruction*, 7(1), 102–120. <https://doi.org/10.32616/pgr.v7.1.439.102-120>.
- Tsania, F. Q. P., & Surawan, S. (2022). Analisis Kesiapan Dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Di Madrasah Ibtidaiyah Manbail Futuh Jenu. *Prosiding SNasPPM*, 7(1), 513–517.
- Tyler, Ralp W. 1969. *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. USA: The University of Chicago Press.
- Wahyudi, M. F., & Harris, T. (2022). Manajemen Strategi Dalam Peningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Pada Masa Penerapan Kurikulum Merdeka di MTs. - MA Sunan Ampel Kebet Lamongan. *CAHAYA KAMPUS*, 2(1), 22–38. <https://journal.unigres.ac.id/index.php/CahayaKampus/article/view/2483>
- Zakiah, N., & Achadi, M. (2023). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Piloting MIN 2 Bantul Yogyakarta. *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 7(2), 229-238. <https://doi.org/10.48094/raudhah.v7i2.221>
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.